SRCE SYNRISE RESEARCH CENTER
ECONOMICS ROOM
https://journal.synrise.org/index.php/ecoroom

e-ISSN : 3165-1488
Vol 1, Issue 1, 2026
pp. 47-58

Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia

Didin Pratama Putra
Politeknik Sains Global, Lombok Tengah, Indonesia

*Corresponding email: *didin.pratama@psg.ac.id*

Article Info

Article history:

Received: 26-08-2026
Revised: 14-09-2026
Accepted: 22-09-2026

Kata kunci:

Pengelolaan Keuangan, Keberlanjutan Usaha, Literasi Keuangan, Modal Kerja

ABSTRAK

Keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola arus kas, modal kerja, keputusan pembiayaan, dan risiko pada kondisi pasar yang berubah. Artikel ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang terintegrasi untuk memperkuat stabilitas ekonomi usaha dan keberlanjutan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur integratif dengan sintesis tematik terhadap publikasi ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan resmi yang relevan. Analisis dilakukan melalui pengelompokan bukti berdasarkan literasi keuangan, pencatatan, pengendalian modal kerja, struktur pembiayaan, digitalisasi, dan ketahanan usaha. Hasil sintesis menunjukkan bahwa perbaikan kinerja keuangan perlu dipahami sebagai rangkaian kemampuan yang saling melengkapi, bukan intervensi tunggal berupa tambahan kredit atau penggunaan aplikasi. Penelitian mengusulkan kerangka pengelolaan keuangan bertahap yang mencakup disiplin transaksi, penganggaran kas, penilaian profitabilitas, akses pembiayaan yang terukur, pengelolaan risiko, dan evaluasi berkala. Kerangka tersebut mempertimbangkan perbedaan kapasitas usaha serta kesenjangan literasi dan akses layanan keuangan. Implikasi praktisnya ialah perlunya pendampingan berbasis diagnosis kondisi usaha dan indikator sederhana yang dapat diperiksa secara rutin. Kajian ini bersifat konseptual sehingga efektivitas hubungan antarkomponen masih memerlukan pengujian empiris pada berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kedudukan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena berperan dalam mendorong aktivitas produksi, memperluas kesempatan kerja, menciptakan sumber pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan UMKM juga berkontribusi terhadap penguatan kewirausahaan dan pemerataan aktivitas ekonomi melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Meskipun demikian, jumlah unit usaha yang besar tidak selalu menunjukkan tingkat produktivitas, efisiensi operasional, dan ketahanan keuangan yang memadai. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, lemahnya kemampuan manajerial, ketidakpastian permintaan pasar, dan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM tidak cukup ditentukan oleh kemampuan mempertahankan kegiatan produksi dan penjualan, tetapi juga memerlukan strategi pengelolaan sumber daya keuangan yang terencana, efisien, dan berorientasi jangka panjang (Beck et al., 2005; Sanistasya et al., 2019).

How to cite: Example: Putra, D. P. (2026). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Economics Room, 1*(1), 47–58.

Perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis turut meningkatkan kompleksitas pengambilan keputusan keuangan pada tingkat usaha. Perubahan harga bahan baku, peningkatan biaya distribusi, keterlambatan pembayaran pelanggan, serta fluktuasi permintaan dapat memengaruhi kemampuan usaha dalam mempertahankan keuntungan dan memenuhi kewajiban operasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan transaksi bisnis menciptakan peluang peningkatan penjualan, tetapi juga menimbulkan kebutuhan pengelolaan biaya, sistem pembayaran, dan administrasi yang lebih kompleks. Dalam kondisi tersebut, pelaku UMKM perlu memahami bahwa peningkatan omzet tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan laba maupun perbaikan arus kas. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus memperhatikan hubungan antara pendapatan, biaya, modal kerja, dan likuiditas agar pertumbuhan usaha dapat berlangsung secara sehat dan berkesinambungan (Tran et al., 2017; Bouwman et al., 2019).

Tantangan pengelolaan keuangan UMKM semakin kompleks ketika perubahan ekonomi eksternal tidak diimbangi dengan kesiapan internal perusahaan. Tekanan inflasi, perubahan biaya pembiayaan, ketidakpastian pasar, dan percepatan transformasi digital menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan adaptasi serta ketepatan pengambilan keputusan. Usaha yang tidak memiliki perencanaan arus kas, pengendalian pengeluaran, dan informasi keuangan yang memadai berpotensi mengalami kesulitan likuiditas meskipun masih menjalankan kegiatan penjualan. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang didukung oleh kemampuan manajerial dan pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu pelaku usaha menyesuaikan strategi operasional terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, ketahanan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi pada tingkat unit usaha (Costa Melo et al., 2023; Savvakis et al., 2024).

Literasi keuangan merupakan faktor penting yang mendasari kualitas keputusan pengelolaan keuangan UMKM. Kemampuan memahami konsep keuangan memungkinkan pemilik usaha mengevaluasi kebutuhan pembiayaan, memperhitungkan risiko, mengalokasikan modal, dan menentukan prioritas penggunaan dana secara lebih rasional. Dalam konteks Indonesia, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Hasil tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara tingkat pemahaman keuangan dan tingkat akses atau penggunaan layanan keuangan pada penduduk Indonesia secara umum, bukan secara khusus pada seluruh pelaku UMKM. Perbedaan tersebut memperkuat pentingnya peningkatan literasi keuangan agar pemanfaatan produk dan layanan keuangan didasarkan pada pemahaman mengenai biaya, manfaat, risiko, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan usaha (Lusardi & Mitchell, 2014; Sanistasya et al., 2019).

Keterbatasan akses pembiayaan juga menjadi persoalan penting dalam pengembangan UMKM, khususnya bagi unit usaha yang belum memiliki administrasi keuangan dan kapasitas pengelolaan modal yang memadai. Akses terhadap sumber pendanaan dapat mendukung pembelian bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan pemasaran, dan investasi usaha. Akan tetapi, tambahan pembiayaan tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja apabila pelaku usaha tidak mampu memperkirakan kebutuhan modal, menghitung kemampuan pembayaran kewajiban, dan mengendalikan penggunaannya. Penelitian Beck et al. (2005) memperlihatkan bahwa perusahaan berukuran kecil cenderung menghadapi hambatan keuangan dan kelembagaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan berukuran besar. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan akses pembiayaan dengan kemampuan pengelolaan keuangan agar penggunaan modal dapat mendukung pertumbuhan usaha tanpa meningkatkan risiko kesulitan keuangan (Beck et al., 2005; Agyapong & Attram, 2019).

Selain literasi keuangan dan pembiayaan, pencatatan transaksi serta pengelolaan modal kerja merupakan komponen mendasar dalam membangun stabilitas keuangan UMKM. Pencatatan yang teratur memungkinkan pemilik usaha mengetahui sumber penerimaan, struktur pengeluaran,

kewajiban pembayaran, serta perkembangan keuntungan usaha. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun anggaran, menentukan harga jual, mengendalikan persediaan, dan merencanakan kebutuhan kas. Pengelolaan modal kerja yang efektif juga membantu menjaga keseimbangan antara persediaan, piutang usaha, utang usaha, dan ketersediaan dana operasional. Penelitian Tran et al. (2017) pada perusahaan kecil dan menengah di Vietnam menunjukkan bahwa pengelolaan komponen modal kerja berkaitan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penguatan sistem pencatatan dan pengendalian modal kerja perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi keuangan UMKM (Tran et al., 2017; Agyapong & Attram, 2019).

Transformasi digital memberikan peluang tambahan bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas jangkauan pasar, serta memperbaiki proses pengelolaan informasi bisnis. Pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan, sistem pembayaran digital, dan teknologi pendukung transaksi berpotensi meningkatkan ketepatan pencatatan serta mempercepat penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan teknologi, melainkan juga pada kemampuan pelaku usaha mengintegrasikannya dengan kebutuhan operasional dan strategi bisnis. Penelitian Bouwman et al. (2019) menunjukkan bahwa inovasi model bisnis pada UMKM yang menjalankan digitalisasi berkaitan dengan peningkatan kinerja melalui pemanfaatan sumber daya dan penerapan strategi. Oleh sebab itu, digitalisasi keuangan perlu dipahami sebagai sarana untuk memperkuat pengendalian dan kualitas keputusan, bukan sekadar penggantian pencatatan manual dengan perangkat elektronik (Bouwman et al., 2019; Costa Melo et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan literasi keuangan, inklusi keuangan, pengelolaan modal kerja, dan digitalisasi dengan kinerja usaha. Sanistasya et al. (2019), misalnya, menemukan hubungan positif antara literasi serta inklusi keuangan dengan kinerja usaha kecil di Kalimantan Timur. Sementara itu, Fairuzi et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan berhubungan positif dengan inklusi keuangan digital, sedangkan inklusi keuangan digital berkaitan dengan peningkatan kinerja kewirausahaan UMKM yang diteliti. Temuan-temuan tersebut memberikan landasan empiris mengenai pentingnya kemampuan finansial dan pemanfaatan layanan keuangan. Namun, hasil penelitian pada berbagai wilayah dan karakteristik usaha tidak dapat secara langsung digeneralisasikan pada seluruh UMKM Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kapasitas manajerial, kondisi pasar, tingkat pemanfaatan teknologi, serta karakteristik siklus kas dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan (Sanistasya et al., 2019; Fairuzi et al., 2025).

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan keuangan yang menghubungkan berbagai komponen strategis secara lebih terpadu. Penelitian sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai hubungan antara variabel keuangan dan kinerja usaha, tetapi pelaku UMKM dalam praktiknya harus mengelola perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pengendalian biaya, keputusan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi secara bersamaan. Oleh karena itu, kesenjangan yang menjadi fokus kajian ini bukan terletak pada belum adanya penelitian mengenai komponen-komponen tersebut, melainkan pada kebutuhan menyusun kerangka implementasi yang praktis, bertahap, dan sesuai dengan kemampuan administratif UMKM. Pendekatan integratif diperlukan agar pengelolaan keuangan dapat diterapkan sebagai proses yang saling berkaitan antara penyediaan informasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha (Agyapong & Attram, 2019; Costa Melo et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi utama strategi pengelolaan keuangan, menganalisis keterkaitannya dengan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan UMKM, serta merumuskan rekomendasi penerapan yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas pelaku usaha. Stabilitas ekonomi dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan unit usaha mempertahankan kelancaran kegiatan operasional, memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu, menjaga kecukupan likuiditas, dan menghadapi gangguan arus kas. Sementara itu,

keberlanjutan usaha merujuk pada kemampuan UMKM mempertahankan kelangsungan kegiatan ekonomi, melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, dan mengembangkan kapasitas usaha dalam jangka panjang. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan literasi keuangan, perencanaan dan pencatatan, pengendalian modal kerja, keputusan pembiayaan, serta digitalisasi keuangan sebagai fondasi penguatan stabilitas dan keberlanjutan UMKM, tanpa mengklaim pembuktian hubungan kausal baru (Lusardi & Mitchell, 2014; Costa Melo et al., 2023).

Sebagai penguatan terhadap kerangka tersebut, penelitian Setiyawan dan Tambunan (2026) terhadap 160 pemilik UMKM pengguna layanan keuangan digital di Jawa Timur menemukan bahwa literasi keuangan berhubungan signifikan dengan inklusi dan kinerja keuangan. Namun, penelitian tersebut tidak menemukan pengaruh langsung teknologi finansial yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi keuangan perlu disertai pemahaman dan kemampuan pengelolaan keuangan agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pelaku usaha (Setiyawan & Tambunan, 2026).

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Pengelolaan keuangan sebagai kapabilitas organisasi

Pengelolaan keuangan adalah proses merencanakan, mencatat, mengalokasikan, menggunakan, memantau, dan mengevaluasi sumber daya uang demi pencapaian tujuan usaha. Pada usaha skala kecil, proses tersebut kerap melekat pada pemilik yang merangkap sebagai pengelola produksi, pemasaran, dan administrasi. Kesederhanaan struktur organisasi memberi kelincahan, tetapi sekaligus memperbesar ketergantungan terhadap ingatan serta penilaian satu orang. Oleh karena itu, sistem yang ringan dan konsisten lebih realistis dibanding prosedur yang rumit tetapi tidak diterapkan.

Dalam perspektif kapabilitas dinamis, keunggulan bertahan bukan hanya berasal dari kepemilikan sumber daya, tetapi dari kemampuan mengenali perubahan, mengambil peluang, dan menata ulang proses internal (Teece, 2007). Penerapannya pada aspek keuangan tampak ketika pemilik meninjau margin setelah biaya meningkat, memperpendek siklus penagihan, atau mengganti pola persediaan ketika permintaan turun. Catatan yang benar menjadi sarana pembelajaran organisasi; tanpa informasi, kemampuan beradaptasi bergantung pada intuisi yang rentan bias.

Kapabilitas keuangan juga harus dibedakan dari skala aset. Usaha dengan modal terbatas dapat memiliki disiplin kas yang baik, sedangkan unit usaha dengan omzet besar dapat menghadapi tekanan likuiditas karena piutang menumpuk. Maka, strategi yang efektif perlu dinilai melalui mutu praktik, bukan semata besarnya anggaran atau banyaknya fitur aplikasi yang digunakan.

Literasi keuangan dan kualitas keputusan

Lusardi dan Mitchell (2014) menjelaskan literasi keuangan sebagai modal manusia yang relevan bagi berbagai keputusan ekonomi. Dalam konteks kewirausahaan, pengetahuan dasar tentang bunga, inflasi, arus kas, biaya peluang, dan diversifikasi risiko membantu pemilik memeriksa apakah keputusan yang terlihat menguntungkan secara nominal memang layak secara ekonomi. Literasi tersebut perlu dibaca bersama keterampilan praktis, seperti membuat anggaran dan memahami syarat pinjaman.

Perbedaan literasi dan inklusi mengandung konsekuensi kebijakan. Seorang pelaku usaha dapat memiliki rekening atau menggunakan pembayaran digital tanpa membuat rekonsiliasi penerimaan. Demikian pula akses pembiayaan dapat tumbuh lebih cepat daripada kemampuan menilai total biaya pinjaman. Oleh sebab itu, keberhasilan program inklusi seharusnya dipantau bukan hanya dari jumlah pengguna, melainkan juga dari perubahan perilaku manajemen dan penurunan risiko keputusan yang tidak terukur.

Literasi tidak secara otomatis berubah menjadi perilaku. Keterbatasan waktu, pencampuran kas keluarga dengan usaha, dan rendahnya persepsi manfaat pencatatan dapat membuat pengetahuan yang dimiliki tidak dipraktikkan. Intervensi yang menggabungkan pelatihan dengan templat kerja sederhana, umpan balik transaksi, dan pendampingan lebih logis dibanding pemberian informasi satu kali.

Modal kerja, profitabilitas, dan likuiditas

Modal kerja bersih lazim dipahami sebagai selisih aset lancar dan kewajiban lancar, tetapi ukuran tersebut tidak selalu mudah diterapkan pada usaha yang belum menyusun neraca. Secara operasional, pengelolaan modal kerja mencakup kas, persediaan, piutang pelanggan, dan utang usaha. Setiap komponen menghadirkan trade-off: stok yang tinggi mendukung kesiapan penjualan, tetapi menyerap kas dan meningkatkan risiko barang rusak; kredit kepada pelanggan dapat mendorong penjualan, namun menunda penerimaan.

Deloof (2003) menemukan hubungan antara kebijakan pengelolaan modal kerja dan profitabilitas pada perusahaan nonkeuangan di Belgia. Penelitian tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi ke usaha mikro Indonesia karena perbedaan ukuran perusahaan dan struktur transaksi. Meski demikian, konsep siklus konversi kas membantu menguraikan mengapa penjualan yang meningkat tidak selalu disertai kas yang cukup untuk menjalankan operasi.

Pada unit usaha skala kecil, indikator dasar yang dapat digunakan adalah saldo kas operasional, jumlah hari persediaan, piutang jatuh tempo, kewajiban tujuh hingga tiga puluh hari, serta marjin kontribusi produk. Indikator yang sedikit tetapi konsisten lebih bermanfaat daripada rasio kompleks yang dibangun dari data tidak lengkap.

Pembiayaan dan ketahanan usaha

Pembiayaan digunakan untuk menutup kebutuhan investasi ataupun modal kerja yang tidak dapat dipenuhi dari kas internal. Sumbernya dapat berupa laba ditahan, tambahan modal pemilik, kredit lembaga keuangan, pendanaan pemasok, dan alternatif yang sah sesuai peraturan. Setiap sumber memiliki struktur biaya, jadwal pembayaran, serta konsekuensi kendali berbeda. Keputusan tidak seharusnya didasarkan pada kemudahan memperoleh dana semata.

Ketahanan usaha merujuk pada kemampuan menyerap gangguan, menyesuaikan operasi, lalu memulihkan fungsi utama. Dari sudut keuangan, ketahanan ditopang oleh kas penyangga, fleksibilitas biaya, diversifikasi pelanggan, pemantauan kewajiban, dan akses dana cadangan yang tidak mendorong ketergantungan. Tekanan utang dapat memperburuk guncangan jika pembayaran tetap berlangsung ketika penerimaan turun.

Kerangka konseptual artikel menempatkan literasi sebagai modal pengetahuan, pencatatan sebagai infrastruktur informasi, pengelolaan modal kerja sebagai mekanisme efisiensi, dan tata kelola pendanaan sebagai instrumen pengendalian risiko. Kombinasi keempatnya membentuk kapasitas adaptif yang diperkirakan mendukung stabilitas dan keberlanjutan, dengan konteks sektor, ukuran, dan karakter pemilik sebagai faktor pembeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur integratif (integrative literature review) yang bertujuan menyatukan argumentasi konseptual, temuan empiris terpilih, dan informasi kelembagaan untuk membangun kerangka analitis. Desain ini dipilih karena pertanyaan penelitian berkaitan dengan integrasi strategi lintas dimensi dan belum diarahkan untuk mengukur estimasi besaran dampak pada satu populasi tertentu. Dengan demikian, penelitian tidak mengumpulkan data primer, tidak melakukan survei responden, serta tidak mengklaim pengujian statistik.

Sumber kajian terdiri atas artikel akademik yang memiliki identitas bibliografis dan dokumen dari lembaga resmi. Penelusuran terarah dilakukan pada tema literasi keuangan, kendala pendanaan perusahaan kecil, pengelolaan modal kerja, kapabilitas dinamis, digitalisasi usaha kecil, dan inklusi keuangan Indonesia. Sumber dasar dipilih untuk memperjelas teori, sedangkan laporan resmi

digunakan untuk memberikan konteks kelembagaan. Artikel ini tidak mengklaim telah mencakup seluruh publikasi yang tersedia dan tidak menggunakan label tinjauan sistematis atau meta-analisis.

Kriteria inklusi adalah kesesuaian langsung dengan aspek pengelolaan keuangan atau keberlanjutan usaha, keterlacakan penerbit dan tahun, relevansi konsep bagi usaha kecil, serta kejelasan konteks asal data. Sumber yang tidak memiliki informasi penerbitan dapat diverifikasi, memuat klaim angka tanpa asal yang jelas, atau membahas topik di luar fokus tidak dijadikan landasan pernyataan empiris. Perbedaan tingkat bukti dipertahankan: survei nasional digunakan hanya untuk mendeskripsikan populasi surveinya, sedangkan temuan lintas negara dipakai sebagai petunjuk mekanisme dan bukan ukuran langsung kondisi Indonesia.

Proses analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, ekstraksi ide pokok dan temuan dari masing-masing rujukan. Kedua, pengodean tematik ke dalam enam domain: pencatatan, literasi, kas dan modal kerja, keputusan pendanaan, penggunaan teknologi, serta risiko dan evaluasi. Ketiga, perbandingan hubungan antardomain untuk mengidentifikasi komplementaritas, ketegangan, dan syarat penerapan. Keempat, penyusunan model implementasi bertahap beserta indikator pemantauan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara argumentatif dengan memisahkan temuan sumber dari usulan konseptual penulis.

Keterbatasan metodologis mencakup kemungkinan bias pemilihan sumber, keragaman definisi kinerja usaha, serta keterbatasan daya generalisasi dari penelitian pada negara atau perusahaan besar. Tidak ada proses penilaian kualitas studi secara kuantitatif dan tidak tersedia estimasi ukuran efek gabungan. Untuk menjaga ketertelusuran, daftar referensi mencantumkan dokumen inti yang menjadi pijakan interpretasi dan angka yang ditampilkan tidak berasal dari simulasi atau data lapangan yang tidak tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis bukti dan peta persoalan keuangan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa persoalan keuangan usaha kecil paling tepat dipahami sebagai kegagalan koordinasi antara informasi, keputusan, dan waktu aliran uang. Ketika transaksi tidak dipisahkan secara konsisten, laba sulit dibedakan dari penarikan pribadi. Ketika persediaan dan piutang tidak dipantau, dana yang secara akuntansi merupakan aset belum tentu tersedia untuk membayar pemasok. Ketika pembiayaan diperoleh tanpa proyeksi pengembalian, kapasitas produksi meningkat tetapi risiko kewajiban tetap bertambah. Karena itu, perbaikan satu domain dapat kehilangan manfaat apabila domain lainnya tertinggal.

Domain	Masalah yang dapat muncul	Praktik prioritas	Indikator praktis
Pencatatan	Kas pribadi dan usaha bercampur	Catatan transaksi harian; rekening terpisah	Rekonsiliasi mingguan
Anggaran kas	Tanggal penerimaan dan pembayaran tidak sinkron	Proyeksi kas 4–12 minggu	Saldo minimum kas
Modal kerja	Stok berlebih; piutang terlambat	Batas stok dan pengingat tagihan	Hari persediaan; piutang jatuh tempo
Pembiayaan	Cicilan melampaui kemampuan kas	Uji arus kas dalam skenario buruk	Rasio cicilan terhadap surplus kas
Digitalisasi	Data transaksi tersebar	Integrasi pembayaran dan catatan	Proporsi transaksi tercatat
Risiko	Tidak ada dana penyangga	Cadangan dan evaluasi skenario	Durasi kas untuk biaya wajib

Tabel 1 menyajikan operasionalisasi yang diusulkan dari sintesis literatur, bukan hasil pengukuran terhadap sampel pelaku usaha. Angka rentang pada contoh proyeksi adalah opsi pengelolaan yang dapat disesuaikan dengan siklus transaksi. Indikator dipilih agar pemilik dapat

menggunakannya bahkan sebelum menyusun laporan keuangan lengkap. Saat data berkembang, indikator dapat ditingkatkan menjadi laporan laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas yang lebih formal.

Disiplin pencatatan dan pemisahan keuangan

Langkah awal pengelolaan keuangan ialah menetapkan batas jelas antara uang milik rumah tangga dan uang operasional. Campuran kedua aliran mengaburkan biaya sesungguhnya karena pengeluaran keluarga dapat terbaca sebagai biaya usaha atau penarikan pemilik tidak dicatat sama sekali. Praktik minimal adalah menggunakan kas atau rekening operasional tersendiri, menetapkan nilai penarikan pemilik secara terencana, dan mencatat seluruh transaksi menurut tanggal serta kategori. Pemisahan ini bukan semata kebutuhan audit; ia memperbaiki ketepatan informasi untuk keputusan sehari-hari.

Pencatatan perlu menghasilkan setidaknya tiga keluaran: posisi kas, gambaran pendapatan dan biaya, serta daftar kewajiban. Buku kas mencerminkan uang masuk dan keluar, tetapi belum selalu memperlihatkan laba apabila persediaan dibeli jauh sebelum barang dijual. Karena itu, pemilik perlu menghubungkan pembelian bahan, stok akhir, penjualan, dan biaya operasional untuk memperoleh perkiraan hasil usaha yang lebih bermakna. Memulai dari format sederhana dapat mengurangi hambatan adopsi.

Rekonsiliasi rutin diperlukan agar catatan tidak sekadar menjadi arsip. Pada akhir pekan, saldo menurut pencatatan dibandingkan dengan kas fisik dan rekening; selisih ditelusuri melalui biaya administrasi, pengembalian pembelian, transaksi tertunda, atau pengeluaran yang luput dicatat. Prosedur ini berfungsi sebagai pengendalian internal sederhana sekaligus membentuk kebiasaan pembelajaran. Apabila nilai usaha meningkat, otorisasi pengeluaran dan pemisahan tugas dapat ditambahkan secara bertahap.

Penganggaran kas sebagai instrumen stabilitas

Anggaran kas berbeda dari target penjualan. Target menjawab besarnya transaksi yang ingin dicapai, sedangkan anggaran kas menjawab kapan uang diperkirakan diterima dan harus dibayarkan. Perbedaan waktu tersebut krusial bagi usaha yang menjual secara tempo, membayar bahan sebelum produksi, atau menghadapi biaya rutin seperti sewa serta gaji. Proyeksi sederhana dapat disusun mingguan dengan kolom saldo awal, penerimaan realistis, pembayaran wajib, pembayaran fleksibel, dan saldo akhir.

Ketika saldo akhir diproyeksikan negatif, terdapat ruang untuk menyesuaikan pembelian stok, mempercepat penagihan yang wajar, merundingkan jadwal pembayaran, atau menunda belanja yang tidak mendesak. Sebaliknya, surplus sementara tidak serta-merta dapat dihabiskan apabila tagihan besar jatuh tempo pada minggu berikutnya. Dengan demikian, anggaran kas berperan sebagai sistem peringatan dini. Nilainya ditentukan oleh ketekunan memperbarui asumsi dan bukan oleh kecanggihan perangkat lunak.

Penerapan anggaran memerlukan analisis sensitivitas terhadap perubahan permintaan atau harga input. Sebagai ilustrasi konseptual, pemilik dapat membandingkan skenario dasar dengan skenario penerimaan turun, sementara biaya tetap tidak berubah. Ilustrasi ini bukan hasil observasi atau estimasi probabilitas ekonomi. Tujuannya ialah memastikan keputusan pembiayaan dan pembelian mempertimbangkan ruang aman, bukan hanya keadaan penjualan terbaik.

Efisiensi modal kerja dan penetapan harga

Persediaan merupakan sumber daya sekaligus potensi pembekuan kas. Pembelian dalam volume besar mungkin menghasilkan diskon, tetapi keuntungan harga dapat hilang oleh biaya penyimpanan, penyusutan, atau barang yang tidak terjual. Dalam usaha makanan, risiko kedaluwarsa memperpendek waktu aman persediaan; pada jasa, modal kerja lebih banyak tertahan dalam pembayaran pelanggan. Oleh karena itu, pengelolaan stok harus dibangun dari pola permintaan sektor, bukan menggunakan aturan seragam bagi seluruh usaha.

Pengendalian piutang dapat ditempuh dengan pencatatan tanggal jatuh tempo, penilaian kelayakan pelanggan, dan pengingat tagihan yang profesional. Kebijakan pembayaran bertahap dapat digunakan pada pekerjaan berbasis proyek untuk menyelaraskan arus kas dengan pengerjaan. Di sisi utang usaha, penundaan pembayaran yang tidak disepakati mungkin memberi kas sesaat namun merusak hubungan pemasok dan meningkatkan harga pembelian di kemudian hari. Kebijakan terbaik menyeimbangkan likuiditas dengan kepercayaan relasional.

Penetapan harga sering kali menjadi titik lemah ketika pelaku usaha mengandalkan perbandingan harga pesaing tanpa menghitung biaya. Harga perlu mempertimbangkan bahan langsung, tenaga kerja yang relevan, biaya kemasan, pembayaran platform, pengiriman yang ditanggung penjual, biaya tetap teralokasi, dan target margin yang wajar. Diskon dinilai berdasarkan laba kontribusi serta tambahan volume yang realistis. Kenaikan omzet karena promosi tidak boleh dinilai berhasil sebelum pengorbanan marginnya diperhitungkan.

Pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas usaha

Pilihan sumber dana harus dimulai dengan definisi kebutuhan, bukan dengan pertanyaan berapa batas pinjaman yang tersedia. Kebutuhan untuk membeli mesin berumur manfaat panjang berbeda dengan kebutuhan membeli bahan baku yang kembali menjadi kas dalam hitungan minggu. Ketidaksesuaian jatuh tempo dapat memunculkan tekanan walaupun investasi tampak produktif. Dalam menganalisis pinjaman, pemilik perlu memperhitungkan total pembayaran, biaya tambahan, jaminan, keterlambatan, dan kemungkinan penerimaan tidak mencapai target.

Beck et al. (2005) memberi penjelasan mengapa usaha kecil lebih rentan menghadapi kendala pembiayaan. Akan tetapi, kendala akses tidak berarti seluruh pinjaman yang disetujui harus diambil. Prinsip kehati-hatian mengutamakan kemampuan menghasilkan arus kas bersih untuk kewajiban dan adanya penyangga bila penjualan melemah. Pinjaman produktif idealnya berkaitan dengan penggunaan dana yang spesifik dan dapat dievaluasi, sehingga hasil investasi dapat dibandingkan dengan biaya modal.

Pemberi dana dan penyelenggara pendampingan dapat meningkatkan kualitas pembiayaan melalui asesmen sederhana atas riwayat arus kas, siklus persediaan, dan kemampuan mencatat transaksi. Pada usaha yang catatannya belum memadai, fase perbaikan administrasi dapat lebih mendesak daripada memperbesar eksposur utang. Pilihan pendanaan sendiri tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum, karakter pembiayaan konvensional maupun syariah, serta preferensi pelaku usaha.

Digitalisasi sebagai alat, bukan tujuan

Digitalisasi menyediakan kesempatan menurunkan biaya pencatatan, mempercepat penerimaan pembayaran, dan memperluas akses informasi. OECD (2023) mengingatkan bahwa kemampuan usaha kecil untuk memanfaatkan teknologi tidak merata dan berkaitan erat dengan keterampilan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan transformasi digital tidak cukup berupa kepemilikan perangkat atau aplikasi; yang lebih penting ialah apakah penggunaan teknologi menghasilkan data yang lebih akurat dan keputusan yang lebih cepat.

Aplikasi kasir dan pembayaran digital, misalnya, baru memberi kontribusi pada pengelolaan apabila transaksi dipetakan ke kategori dan dilakukan pencocokan terhadap saldo rekening. Jika penjualan melalui berbagai kanal tidak disatukan, data terpecah dan biaya platform mungkin luput dihitung. Penggunaan aplikasi secara paralel dengan pencatatan manual juga dapat menggandakan pekerjaan jika tidak terdapat prosedur yang jelas untuk menentukan sumber data utama.

Risiko digital harus ikut dikelola, termasuk kehilangan akses akun, penipuan, kebocoran data pelanggan, serta ketergantungan pada satu platform. Pelaku usaha memerlukan pengamanan autentikasi, pembatasan akses, cadangan catatan, dan pemeriksaan biaya transaksi. Tahap digitalisasi yang rasional adalah memilih masalah operasional yang ingin diselesaikan, menguji satu fungsi inti, menilai manfaatnya, lalu memperluas penggunaan jika kapasitas pengguna telah memadai.

Literasi, perilaku, dan desain pendampingan

Literasi keuangan yang efektif harus tampak dalam kebiasaan keputusan. Pengetahuan perbedaan antara laba dan kas baru berguna jika pemilik berhenti mengambil seluruh penerimaan harian untuk keperluan pribadi. Pengetahuan bunga pinjaman baru menghasilkan manfaat apabila alternatif pendanaan dibandingkan atas dasar total biaya dan kemampuan bayar. Dengan kata lain, indikator keberhasilan pendidikan keuangan perlu mengamati perilaku yang berubah, bukan hanya skor pengetahuan setelah pelatihan.

Kesenjangan indeks literasi dan inklusi dalam survei Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik (2024) tidak boleh ditafsirkan sebagai ukuran langsung kualitas manajemen keuangan pengusaha. Akan tetapi, data tersebut menunjukkan pentingnya membedakan akses dengan kapasitas menggunakan produk. Bagi pendamping usaha, implikasinya ialah memadukan pengetahuan dengan contoh transaksi nyata, lembar kas yang digunakan berulang, dan penilaian kondisi usaha sebelum serta sesudah kegiatan.

Pelatihan perlu dibedakan menurut tahap kematangan. Pada tahap awal, prioritas adalah pencatatan kas dan pemisahan uang; pada tahap berkembang, pemilik mempelajari perhitungan margin, manajemen stok, dan anggaran; sedangkan tahap lebih mapan dapat menggunakan laporan periodik dan analisis investasi. Pendekatan bertahap mengurangi risiko pelatihan terlalu teoritis dan memungkinkan kemajuan dinilai secara konkret.

Model strategi integratif dan urutan implementasi

Berdasarkan tema-tema yang muncul, artikel ini mengusulkan model enam tahap dengan hubungan umpan balik: (1) pemisahan dan pencatatan; (2) diagnosis arus kas dan margin; (3) perbaikan modal kerja; (4) pembiayaan dan cadangan risiko; (5) digitalisasi terarah; dan (6) evaluasi serta adaptasi. Urutan bukan prosedur kaku; usaha dengan risiko gagal bayar yang mendesak dapat harus menangani kewajiban terlebih dahulu. Namun, data dasar tetap menjadi fondasi agar intervensi berikutnya tidak bergantung semata pada dugaan.

Tahap	Tindakan manajerial	Bukti pelaksanaan	Sinyal untuk penyesuaian
1. Fondasi	Pisahkan dana dan catat transaksi	Buku kas lengkap per hari	Selisih kas berulang
2. Diagnosis	Susun proyeksi kas dan margin produk	Ringkasan kas dan biaya bulanan	Margin positif tetapi kas menurun
3. Optimalisasi	Atur stok, piutang, dan jadwal bayar	Daftar umur piutang dan stok	Stok lambat atau tagihan tertunda
4. Proteksi	Nilai utang dan cadangan operasi	Jadwal kewajiban dan dana cadangan	Surplus tidak cukup untuk cicilan
5. Digitalisasi	Gunakan alat sesuai kebutuhan	Laporan kanal transaksi terpadukan	Kesalahan transaksi dan biaya membesar
6. Pembelajaran	Tinjau hasil dan revisi rencana	Rapat evaluasi dan target berikutnya	Penyimpangan berulang tanpa koreksi

Model ini menekankan hubungan saling melengkapi. Pencatatan meningkatkan kualitas proyeksi; proyeksi mendukung keputusan stok dan pembayaran; efisiensi modal kerja memperbesar fleksibilitas; sementara pemilihan pembiayaan yang hati-hati mengurangi risiko tekanan kas. Digitalisasi mempercepat proses jika disiplin data telah terbentuk. Evaluasi menutup siklus dengan meninjau perubahan kondisi dan mengubah aturan operasional ketika diperlukan.

Perbedaan kebutuhan menurut karakter usaha

Strategi tidak dapat diterapkan secara identik kepada seluruh pelaku usaha. Pedagang barang konsumsi berputar cepat memerlukan kontrol persediaan dan transaksi tunai, sedangkan usaha produksi rumahan menghadapi jeda antara pembelian bahan, produksi, dan penjualan. Penyedia jasa profesional mungkin memiliki stok kecil tetapi menghadapi keterlambatan penerimaan

pembayaran proyek. Perbedaan tersebut membuat prioritas indikator harus mengikuti siklus kas dan risiko utama setiap model bisnis.

Dimensi skala juga penting. Usaha mikro yang dikelola sendiri dapat memulai dari pencatatan di buku atau lembar elektronik sederhana. Saat pegawai, pelanggan kredit, dan transaksi meningkat, kebutuhan atas pengendalian internal serta pelaporan menjadi lebih besar. Memaksakan prosedur perusahaan besar pada usaha yang baru dimulai dapat menciptakan biaya kepatuhan yang tidak proporsional; sebaliknya, mempertahankan prosedur informal ketika transaksi kompleks meningkat berisiko memicu kesalahan dan penyalahgunaan.

Konteks geografis dan layanan pendukung juga memengaruhi kemampuan menerapkan strategi. Ketersediaan koneksi internet, pendampingan, akses lembaga keuangan, dan perubahan musiman permintaan berpotensi berbeda antarwilayah. Karena data khusus wilayah tidak dianalisis dalam penelitian ini, perbedaan tersebut ditempatkan sebagai kondisi yang perlu diuji dalam penelitian berikutnya, bukan sebagai peringkat kinerja daerah.

Implikasi kebijakan dan kontribusi teoretis

Dari perspektif kebijakan, program penguatan usaha sebaiknya membedakan masalah kekurangan modal dari masalah lemahnya pengelolaan. Kredit bersubsidi dapat membantu ketika usaha memiliki peluang produktif dan kapasitas pembayaran, tetapi tidak menggantikan kebutuhan pencatatan dan evaluasi. Bantuan pelatihan juga perlu terhubung dengan hasil nyata, misalnya peningkatan kelengkapan transaksi, berkurangnya tagihan terlambat, dan terbentuknya anggaran kas yang dipakai dalam keputusan.

Lembaga pendamping, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan penyedia layanan keuangan dapat menggunakan instrumen diagnosis singkat sebelum menentukan intervensi. Pengukuran sebaiknya mencakup kebiasaan kas, tingkat ketergantungan pada utang jangka pendek, perputaran stok, dan kemampuan membaca biaya produk. Pemantauan dalam beberapa periode lebih informatif dibanding satu kali penilaian segera setelah pelatihan, karena perubahan perilaku membutuhkan pengulangan.

Secara teoretis, kajian ini menggeser fokus dari pendekatan variabel tunggal menuju komplementaritas kapabilitas. Literasi menyediakan dasar pengetahuan; pencatatan menciptakan informasi; disiplin modal kerja memengaruhi waktu ketersediaan kas; struktur pembiayaan mengatur ruang keputusan; dan proses evaluasi memelihara kemampuan adaptif. Kerangka tersebut menyiratkan hipotesis bahwa manfaat digitalisasi terhadap stabilitas akan lebih besar pada usaha dengan disiplin pencatatan yang memadai, tetapi hipotesis ini belum diuji dalam artikel ini.

Penelitian empiris mendatang dapat menerapkan rancangan panel atau intervensi terkontrol untuk menilai perubahan arus kas dan tingkat bertahan usaha. Kinerja semestinya diukur dengan gabungan indikator objektif, seperti kecukupan kas dan keterlambatan pembayaran, serta indikator persepsi yang tervalidasi. Pengendalian sektor, umur usaha, pendidikan pemilik, permintaan lokal, dan karakter pembiayaan diperlukan agar hubungan yang terlihat tidak disalahartikan sebagai kausalitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa stabilitas ekonomi dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak cukup dibangun melalui tambahan modal ataupun adopsi teknologi secara terpisah. Yang lebih mendasar adalah terbentuknya sistem pengelolaan keuangan yang menghubungkan pencatatan yang dapat dipercaya, anggaran kas, efisiensi modal kerja, pengambilan keputusan pembiayaan yang berhati-hati, serta evaluasi risiko. Strategi tersebut dapat dimulai dari prosedur sederhana dan dikembangkan seiring meningkatnya kompleksitas usaha.

Kontribusi utama artikel adalah model implementasi enam tahap yang menyatukan aspek perilaku, informasi, dan keputusan keuangan. Model ini bersifat konseptual, bukan bukti bahwa seluruh tahap akan menghasilkan peningkatan kinerja dengan besaran tertentu. Temuan dari

literatur internasional juga harus diterapkan secara hati-hati karena karakter usaha dan lingkungan regulasi Indonesia beragam.

Disarankan agar pemilik usaha memprioritaskan pemisahan kas, rekonsiliasi, dan proyeksi kewajiban sebelum memperbesar utang atau investasi. Program pendampingan perlu menyesuaikan intervensi dengan diagnosis kondisi aktual dan menggunakan indikator hasil yang dapat diukur. Penelitian lanjutan diharapkan menguji kerangka melalui data longitudinal atau eksperimen lapangan lintas sektor agar efektivitas, urutan optimal, dan batas penerapan tiap strategi dapat dinilai lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahangar, N. (2021). Is the relationship between working capital management and firm profitability non-linear in Indian SMEs? *Small Enterprise Research, 28*(1), 23–35. https://doi.org/10.1080/13215906.2021.1872685

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to growth: Does firm size matter? *The Journal of Finance, 60*(1), 137–177. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x

Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms? *Journal of Business Finance & Accounting, 30*(3–4), 573–588. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00008

Drexler, A., Fischer, G., & Schoar, A. (2014). Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. *American Economic Journal: Applied Economics, 6*(2), 1–31. https://doi.org/10.1257/app.6.2.1

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

McKenzie, D., & Woodruff, C. (2017). Business practices in small firms in developing countries. *Management Science, 63*(9), 2967–2981. https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2492

Musah, A., Gakpetor, E. D., & Pomaa, P. (2018). Financial management practices, firm growth and profitability of small and medium scale enterprises (SMEs). *Information Management and Business Review, 10*(3), 25–37. https://doi.org/10.22610/imbr.v10i3.2461

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD SME and entrepreneurship outlook 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/342b8564-en

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024a, August 2). *Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/ojk-dan-bps-umumkan-hasil-survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-tahun-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2024b). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024*.

Otoo, F. N. K. (2024). Assessing the influence of financial management practices on organizational performance of small- and medium-scale enterprises. *Vilakshan—XIMB Journal of Management, 21*(2), 162–188. https://doi.org/10.1108/XJM-09-2023-0192

Panda, A. K., Nanda, S., & Panda, P. (2021). Working capital management, macroeconomic impacts, and firm profitability: Evidence from Indian SMEs. *SAGE Open, 11*(1). https://doi.org/10.1177/2278533720923513

Supari, S., & Anton, H. (2022). The impact of the National Economic Recovery Program and digitalization on MSME resilience during the COVID-19 pandemic: A case study of Bank Rakyat Indonesia. *Economies, 10*(7), Article 160. https://doi.org/10.3390/economies10070160

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal, 28*(13), 1319–1350. https://doi.org/10.1002/smj.640

Tran, H., Abbott, M., & Yap, C. J. (2017). How does working capital management affect the profitability of Vietnamese small- and medium-sized enterprises? *Journal of Small Business and Enterprise Development, 24*(1), 2–11. https://doi.org/10.1108/JSBED-05-2016-0070